



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.841, 2014

KEMANTAN. Sekolah Tinggi Penyuluhan  
Pertanian. Manokwari. Statuta Pencabutan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/Permentan/OT.140/6/2014

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari yang selanjutnya disebut STPP Manokwari adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Manokwari adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Manokwari yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakterologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis

yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.

4. Senat STPP Manokwari yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Manokwari.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Manokwari.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Manokwari.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Manokwari.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Manokwari yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Manokwari.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Manokwari yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Manokwari.
11. Ketua STPP Manokwari yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Visi STPP Manokwari menjadi perguruan tinggi fungsional pertanian unggul di kawasan timur Indonesia dengan lulusan yang profesional, berwawasan global, dan berbasis kearifan lokal.

### Pasal 3

Misi STPP Manokwari adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi fungsional dibidang penyuluhan pertanian dan peternakan serta Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) lainnya;
- b. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kualitas sivitas akademika yang profesional, berwawasan global, dan berbudaya;
- d. Mengembangkan kelembagaan pendidikan yang profesional dan kredibel; dan
- e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bermutu.

### Pasal 4

Tujuan STPP Manokwari adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional Penyuluh Pertanian dan RIHP lainnya;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang RIHP; dan
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian bagi masyarakat pertanian.

## BAB III

### IDENTITAS

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Hari Jadi

### Pasal 5

- (1) Lokasi STPP Manokwari berkedudukan di Manokwari.
- (2) STPP Manokwari memiliki kampus beralamat di Jalan SPMA Reremi Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

### Pasal 6

- (1) STPP Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan pada tanggal 13 Agustus 2002.
- (2) Tanggal 13 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari jadi (*dies natalis*) STPP Manokwari.

## Lambang, Bendera, Mars dan Hymne

### Pasal 7

- (1) STPP Manokwari memiliki Lambang, Bendera, Mars dan Hymne.
- (2) Lambang, Bendera, Mars dan Hymne sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Pendidikan

### Pasal 8

STPP Manokwari menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam bidang RIHP.

### Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa dapat berasal dari masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan akademik sesuai kebutuhan pembangunan pertanian.
- (2) Persyaratan penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh STPP Manokwari.
- (2) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diumumkan secara terbuka.

### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Manokwari berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Kurikulum STPP Manokwari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

### Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala berbentuk ujian, penugasan, dan atau pengamatan oleh Dosen.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (komprehensif).
- (3) Kriteria penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (4) Pelaksanaan dan penetapan hasil belajar ditetapkan oleh Ketua.

### Pasal 13

Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.

### Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan sistem administrasi di STPP Manokwari.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Penelitian

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan STPP Manokwari.
- (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan pihak lain atau mandiri.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diseminarkan dalam forum ilmiah dan didokumentasikan di perpustakaan STPP Manokwari.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- (3) Hasil penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan di STPP Manokwari.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pertanian.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara lain dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mandiri.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua STPP Manokwari.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu.

Pasal 20

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau



mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.

## BAB VI

### GELAR, IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

#### Pasal 21

- (1) Lulusan pendidikan STPP Manokwari berhak menggunakan:
  - a. Gelar vokasi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan vokasi;
  - b. Gelar akademik untuk lulusan yang mengikuti pendidikan akademik; dan
  - c. Gelar profesi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan profesi.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah.

#### Pasal 22

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Ketua.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua dan diketahui Kepala Badan.

#### Pasal 23

- (1) Sertifikat Profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) STPP Manokwari menyelenggarakan upacara akademik antara lain pelantikan mahasiswa baru, yudisium, wisuda, dies natalis, lustrum dan pemberian tanda penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 25

Susunan Organisasi STPP Manokwari terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Unsur Penjaminan Mutu;
- e. Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik;
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g. Bagian Administrasi Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 26

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota meliputi:
    - 1) Wakil Ketua;
    - 2) Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi;
    - 3) Perwakilan Dosen; dan
    - 4) Unsur lain.
- (2) Jumlah anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil.
- (3) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Ketua.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih dari anggota.
- (5) Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3), dipilih sebanyak 20% (dua puluh persen) dari dosen tetap mewakili kelompok bidang ilmu dan teknologi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) ditetapkan oleh Senat.

#### Pasal 27

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:

- a. merumuskan norma, kebijakan dan pengembangan akademik;
- b. merumuskan rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- d. mengawasi kebijakan, pelaksanaan akademik dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tolok ukur yang telah ditetapkan;
- f. memberikan rekomendasi dalam pengusulan calon wakil ketua;
- g. memberikan rekomendasi terhadap dupak yang diusulkan dosen;
- h. memberikan rekomendasi kelayakan pengangkatan dan pemberhentian dosen; dan
- i. memberikan rekomendasi pengusulan calon pelaksana akademik.

#### Pasal 28

- (1) Senat bersidang paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari anggota senat yang hadir.

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat mengundang unsur lain yang diperlukan.

#### Bagian Ketiga

#### Ketua dan Wakil Ketua

#### Pasal 30

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. membina Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
- c. membina tata kelola administrasi; dan
- d. membina tata kehidupan lingkungan kampus.

#### Pasal 31

- (1) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 32

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua.

#### Pasal 33

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dijabat oleh seorang dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik;
  - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum; dan
  - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

- (6) Persyaratan dan tata cara pemilihan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (7) Ketua mengusulkan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Senat.
- (8) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Ketua.
- (9) Masa jabatan Wakil Ketua paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Apabila Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Koordinator Harian.
- (2) Apabila Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a juga berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum bertindak sebagai Koordinator Harian.
- (3) Apabila Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b juga berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertindak sebagai Koordinator Harian.

#### Bagian Keempat

#### Unsur Penjaminan Mutu

#### Pasal 35

Unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Akreditasi; dan
- c. Sertifikasi.

#### Pasal 36

- (1) STPP Manokwari menerapkan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Satuan Penjaminan Mutu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Ketua.

#### Pasal 37

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
  - a. Akreditasi institusi perguruan tinggi; dan
  - b. Akreditasi program studi.
- (2) Akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi secara periodik.

#### Pasal 38

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
  - a. Sertifikasi Profesi; dan
  - b. Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh Dosen sebagai bentuk pengakuan profesionalisme dan keilmuan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keahlian tertentu.

### Bagian Kelima

#### Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik

#### Pasal 39

Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:

- a. Jurusan; dan
- b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

#### Pasal 40

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan himpunan sumberdaya pendukung yang melaksanakan dan mengelola pendidikan vokasi, akademik, dan profesi dalam sebagian atau satu bidang RIHP.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki satu atau lebih program studi dan beberapa laboratorium.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi.

- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi melayani kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan.
- (6) Jenis dan jumlah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di ditetapkan oleh Ketua sesuai kebutuhan.

#### Pasal 41

- (1) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua Jurusan;
  - b. Sekretaris Jurusan;
  - c. Ketua Program Studi; dan
  - d. Kepala Laboratorium.
- (2) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Pengelola Jurusan diatur dengan ketentuan Senat.
- (6) Masa jabatan Pengelola Jurusan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 42

- (1) UPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan salah satu unsur pelaksana akademik, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala UPPM; dan
  - b. Sekretaris UPPM.

- (3) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh dosen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (4) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Kepala dan Sekretaris UPPM diatur dengan ketentuan Senat.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 43

- (1) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:
  - a. Instalasi Asrama;
  - b. Instalasi Perpustakaan;
  - c. Instalasi Komputer dan Media Penyuluhan; dan
  - d. Instalasi Sarana Pendidikan.
- (2) Masing-masing instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (4) Persyaratan dan uraian tugas Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Ketua.

#### Bagian Keenam

#### Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa dan Bagian Administrasi Umum

#### Pasal 44

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa (BAAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan mahasiswa di lingkungan STPP Manokwari.
- (2) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
  - b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan; dan
  - c. pelaksanaan administrasi mahasiswa dan alumni.



- (3) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Subbagian Pendidikan dan Kerjasama;
  - b. Subbagian Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Uraian tugas masing-masing Subbagian pada BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Bagian Administrasi Umum (BAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat.
- (2) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi persuratan;
  - c. pelaksanaan administrasi perlengkapan;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan administrasi rumah tangga; dan
  - f. pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat.
- (3) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha.
- (4) Uraian tugas masing-masing Subbagian pada BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas Dosen dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang diusulkan Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (3) Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan Ketua.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional Dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berdasarkan kode etik yang berlaku.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STPP Manokwari;
  - c. mengutamakan kepentingan STPP Manokwari dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela;
  - e. menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
  - f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu menghargai pendapat orang lain;
  - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
  - h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
  - i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
  - j. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Manokwari;
  - k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - l. mendidik dan membimbing mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab; dan;
  - m. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Manokwari.

## Pasal 48

- (1) Pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, memperhatikan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STPP Manokwari;
  - c. mengutamakan kepentingan STPP Manokwari dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  - e. berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
  - f. menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
  - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
  - h. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Manokwari;
  - i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan STPP Manokwari;
  - j. senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - k. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Manokwari.

## BAB VIII

## MAHASISWA DAN ALUMNI

## Pasal 49

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bagi Sivitas Akademika;
  - b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;

- c. memanfaatkan fasilitas STPP Manokwari dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari dosen sesuai dengan program studi yang diikutinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan
- f. memanfaatkan sumber daya STPP Manokwari sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di STPP Manokwari.

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi tata tertib, kedisiplinan dan peraturan lain di STPP Manokwari;
- b. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Manokwari;
- c. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik STPP Manokwari;
- e. mematuhi etika akademik; dan
- f. aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(3) Kode etik mahasiswa meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Manokwari;
- c. menjaga nama baik dan kewibawaan STPP Manokwari sebagai almamater;
- d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
- e. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
- f. membantu terselenggaranya kegiatan STPP Manokwari baik akademik maupun non akademik;
- g. bersikap jujur, disiplin, semangat, peduli, berbudi luhur, dan bertanggungjawab;
- h. menghindari perbuatan tercela dan asusila;
- i. menjalin suasana hidup kekeluargaan;
- j. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Kampus STPP Manokwari;

- k. belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  - l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Manokwari.
- (4) Sanksi administratif dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran administratif, akademik, dan atau kode etik yang diatur dalam pedoman akademik dan tata kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 50

- (1) Untuk pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus, harus dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Struktur organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas BPM dan BEM.
- (3) BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menetapkan garis-garis besar haluan BEM dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BEM.
- (4) BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus.
- (5) Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPM dalam bentuk Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, Tata Tertib Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan, dan Tata Cara Pembentukan Pengurus BPM dan BEM.
- (6) Pengurus BPM dan BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan hasil pemilihan mahasiswa.

#### Pasal 51

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan STPP Manokwari, memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (2) Memperluas jejaring kerja sama dengan alumni untuk memajukan almamater.
- (3) Ketua mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni.

## BAB IX

## KERJA SAMA

## Pasal 52

- (1) STPP Manokwari dapat mengadakan kerja sama dan atau kemitraan dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara STPP Manokwari dengan pihak lain dilakukan dengan azas saling menguntungkan, saling menghormati, sinergis, memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 53

- (1) Sarana dan prasarana STPP Manokwari adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pendidikan tinggi.
- (2) Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Ketua.

## BAB XI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan STPP Manokwari berasal dari APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 76/Permentan/OT.140/6/2014  
TANGGAL: 11 Juni 2014

### LAMBANG STPP MANOKWARI

Gambar dan slogan sebagai berikut:



Isi lambang STPP Manokwari sebagai berikut:

- a. Bentuk Siluet Tabura (Triton) yang terbentuk dari tiga lidah api, bewarna kuning emas diatas wadah yang berbentuk buku yang terbuka bewarna putih. Kedua simbol terletak dalam lingkaran yang bewarna hijau, yang dikelilingi oleh tulisan "SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI" bewarna hitam dalam segi lima putih;
- b. Arti simbol Tabura, melambangkan simbol alat komunikasi orang papua;
- c. Lidah api melambangkan simbol suluh penerang dan semangat yang didasari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Buku melambangkan simbol perguruan tinggi;
- e. Warna kuning melambangkan simbol kemakmuran dan keadilan, sebagai tujuan pembangunan nasional.

Makna lambang STPP Manokwari:

STPP Manokwari merupakan lembaga pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, berada di bawah naungan Kementerian Pertanian melaksanakan pendidikan penyuluhan pertanian dan peternakan serta rumpun ilmu hayat pertanian lainnya, dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi terus tumbuh dan



berkembang secara dinamis dan inovatif mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Ukuran standar lambang STPP Manokwari:

- a. Vertikal : 6 cm
- b. Horizontal : 6,5 cm

## BENDERA STPP MANOKWARI

Ketentuan Bendera STPP Manokwari sebagai berikut:

- a. Bendera STPP Manokwari berbentuk empat persegi panjang berwarna kuning dengan lambang STPP Manokwari di tengahnya.
- b. Bendera STPP Manokwari berskala panjang berbanding lebar, 3 : 2 (tiga dibanding dua).
- c. Bendera STPP Manokwari memiliki warna dasar kuning dengan pinggiran hiasan emas dengan logo di tengah yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran bendera.

Gambar:



MARS STPP MANOKWARI

Mars STPP Manokwari merupakan lagu wajib STPP Manokwari

do: ber 2/2

MARS  
STPP MANOKWARI

NELSON MANSOARA S.Sos

5	1	2	3	3	4	6	5	4	3	.	0	5	4	3	2	2	2	2	1	2
5	6	7	1	1	1	4	3	2	1	.	0	1	2	1	7	7	7	7	5	7
1	2	3	5	5	6	6	6	7	5	.	0	5	6	6	5	5	4	4	3	4
5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	.	0	1	1	1	5	5	5	5	5	5

Ba-tu-kan Mi-si da-lam Langkai mu      sing-sing kan le-ri ngan tu ntas kan Mi-

3	.	3	.	4	4	4	5	6	.	1	5	5	6	5	.	4	4	4	4	5	.
1	.	1	.	1	1	1	2	1	.	3	3	3	4	3	.	2	2	2	2	2	.
5	.	5	.	6	6	6	5	4	.	5	1	1	1	1	.	6	6	6	6	6	.
1	.	1	.	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	.	2	2	2	2	2	.

si      sa-tu-kan te-kad      te-rus me-na-bur      de-la-nah pa-pua

5	.	6	6	1	.	5	.	5	.	7	7	7	7	.	6	6	6	6	5	.
2	.	4	4	4	.	3	.	3	.	2	2	3	2	.	4	4	4	4	3	.
7	.	1	1	6	.	1	.	1	.	5	5	5	5	.	1	1	1	1	5	.
5	.	1	1	1	.	1	.	1	.	5	5	5	2	.	1	1	1	1	1	.

ber-sa-ma      trus      tempa sma-ngat      pe-ngabdi-an-mu

5	.	6	6	1	.	5	.	5	.	7	7	1	7	.	6	6	6	7	.	.
3	.	4	4	4	.	3	.	3	.	2	2	3	2	.	4	4	4	4	.	.
2	.	1	1	6	.	5	.	5	.	5	5	5	5	.	1	1	1	1	.	.
1	.	1	1	1	.	1	.	1	.	5	5	5	2	.	1	1	1	1	.	.

ber-sa-ma      trus      ju ngung te-kad      pe-ngor-ba-ran

1	.	5	.	5	.	6	5	4	5	6	.	1	5	4	6	5	.	7	7	.	.
3	.	4	.	3	.	4	3	2	3	4	.	4	3	4	3	.	2	2	.	.	
5	.	6	.	5	.	1	1	6	7	1	.	6	5	6	5	.	5	5	.	.	
1	.	2	.	1	.	1	1	1	1	1	.	1	1	.	1	.	2	2	.	.	

tu      A-mal-kan bakti      tuk ra      ih      ke-se-

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 2 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline 7 & 7 & 7 \\ \hline 2 & 3 & 2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline i & & i \\ \hline 3 & & 3 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline 3 & 3 & 3 \\ \hline i & i & i \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 7 & \\ \hline 3 & 4 & \\ \hline i & 7 & \\ \hline 1 & 1 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline i & & \\ \hline 3 & & \\ \hline i & & \\ \hline 1 & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 6 & \\ \hline 4 & 4 & \\ \hline i & i & \\ \hline 1 & 1 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline i & i & 7 \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline 6 & 6 & 6 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline \end{array}$   
 jah-te-ra-ai      se-kolah tinggi      Pen-yu-lu-han Per-ta-ni-

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 6 & 5 \\ \hline 3 & 4 & 3 \\ \hline i & i & i \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 6 & \\ \hline 4 & 4 & \\ \hline i & i & \\ \hline 1 & 1 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & & 5 \\ \hline 3 & & 3 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & 7 & 7 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & & 7 \\ \hline 2 & & 2 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & 7 & 7 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & & 7 \\ \hline 2 & & 2 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array}$   
 an      Ma nok - wa ri      si-ap me-ngem ban      si-ap me-ngab-

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & 6 & \\ \hline 2 & 4 & \\ \hline 5 & i & \\ \hline 5 & 1 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 7 & \\ \hline 4 & 4 & \\ \hline i & 7 & \\ \hline 1 & 2 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & & 5 \\ \hline 3 & & 3 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 4 & 6 \\ \hline 4 & 3 & 4 \\ \hline i & 6 & 7 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & & 6 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 7 & i \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline i & i & 7 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & & 6 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array}$   
 di      si-ap      mem - ba ngun      se - ba - gai      pe-

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 4 & 6 \\ \hline 3 & 2 & 4 \\ \hline 5 & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 6 & 6 \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 6 & 6 \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 7 & 1 \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 6 & 7 \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline i & i & 7 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & & 6 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 7 & i \\ \hline 4 & 4 & 4 \\ \hline i & i & 7 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & & 6 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline i & & i \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array}$   
 le - por      Pem-bang-u-nan      Per-ta-ni-an      S T P P Ma-

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 3 & i \\ \hline 3 & 3 & 6 \\ \hline 5 & i & 3 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & 2 \\ \hline 7 & & 7 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & 2 \\ \hline 7 & & 7 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & 2 \\ \hline 7 & & 7 \\ \hline 4 & & 4 \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline i & & i \\ \hline 5 & & 5 \\ \hline 3 & & 3 \\ \hline 1 & & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$   
 nok - wa ri      te - tap      sa - ya

### HYMNE STPP MANOKWARI

Hymne STPP Manokwari Merupakan lagu resmi STPP Manokwari yang diperdengarkan pada setiap upacara Akademik STPP Manokwari

do: tes 4/4

## Hymne STPP Manokwari

nelson Mansoara

3	3	3	4	6	5	4	3	.	.	5	6	.	4	6	5	.	.	5	1	.	1	2	1	1	7
1	1	1	2	3	2	1	.	.	3	2	.	2	4	3	.	.	3	3	.	3	4	3	3	5	
5	5	5	6	5	7	2	1	.	.	5	1	.	.	6	2	.	.	1	5	.	5	6	5	5	5
1	1	1	4	4	1	1	1	.	.	1	4	.	4	4	1	.	.	1	1	.	1	1	1	1	1

Kau a - da - lah sur - tuh cah - ya ge - mi - lang Karsa dan Karya penyu

6	.	.	6	6	2	.	2	2	2	1	1	1	.	7	1	6	.	7	5	.	.	3	4
4	.	.	4	4	4	.	4	4	4	4	4	5	.	3	3	.	.	2	2	.	.	1	2
1	.	.	1	1	6	.	6	6	6	6	2	.	.	1	1	.	.	6	7	.	.	5	5
1	.	.	1	1	1	.	1	1	1	1	1	5	.	1	1	.	.	2	2	.	.	5	5

luh un - tuk me - na - bur di ham - par - an per sa da S T

5	5	6	6	7	1	.	5	5	5	6	1	1	2	1	2	3	.	.	1	6	.	2	7
3	3	4	3	4	5	.	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	.	.	3	4	.	4	.
1	1	1	1	2	3	.	1	1	1	1	1	1	7	2	1	7	.	.	1	2	.	7	2
1	1	4	5	5	1	.	.	1	1	1	5	5	5	5	5	3	.	.	1	4	.	5	.

P P Ma - nok wari Pe - ngem - ban da - lam Pem - bang - unan Per - ta - ni -

1	.	.	0	1	6	.	7	1	7	1	6	5	.	.	5	5	.	6	5	.
3	.	.	0	3	4	.	4	5	5	5	4	3	.	.	8	2	.	3	2	.
5	.	.	0	5	1	.	2	3	2	3	2	1	.	.	1	7	.	1	7	.
1	.	.	0	1	1	.	5	5	5	5	5	1	.	.	1	2	.	3	4	.

an Men - gen - tas kan Kemiskin - an luk meng - ga - pai

4	3	2	3	4	4	5	.	.	5	5	3	.	3	4	3	2	1	1	.	6	1
2	1	7	1	2	2	3	.	.	3	3	5	.	5	6	5	5	5	4	.	4	1
6	5	5	6	7	7	1	.	.	5	5	1	.	1	2	1	1	7	6	.	1	1
1	1	1	2	7	1	.	.	5	5	1	.	1	1	1	2	3	4	.	4	4	

Ke se - jah - te - ra - an Ci - ta da - lam te - kud pen - jab - di - an di

7	- 1	7	7	4	6	5	-	-	5	5	i	i	-	1	2	i	3	-	-	5
6	- 5	4	4	4	4	3	-	-	3	3	3	3	-	3	4	- 4	5	-	-	3
2	- i	2	2	7	2	i	-	-	i	i	5	5	-	5	6	- 6	i	-	-	i
5	- 5	5	5	5	5	1	-	-	1	1	i	i	-	1	4	- 4	i	-	-	1
da - da se - ti - ap in - san      S T P P Ma - noK - wa ri      smo -																				

i	- i	7	7	3	2	i	-	0
4	- 4	5	5	5	4	3	-	0
6	- 6	2	2	i	7	5	-	0
1	- 1	5	5	5	5	1	-	0
ga Tuhan memberka - ti								

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO